

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Apriani R. S, 2023, *Hukum Dan HAM*. Bandung: Widina.

Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum Edisi Revisi*, Padang: Angkasa Raya.

Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : CV Alfabeta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press

-----, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Mochtar, Z. A, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatanya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Rajawali Press.

Nurul Qamar, 2016, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafik.

Rangga Kusuma Putra, 2024, *Hak Asasi Manusia*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, hlm. 60

SHRDC-HRDC, 2001, *Komnas HAM dan Prinsip-Prinsip Paris*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Press.

Soerjono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Sriyana, 2007, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sunarso, 2020, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Surakarta: CV. Indotama Solo.

Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono, 2001, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung: Alfabeta.

Umar sholehudin, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press.

Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

## **C. Jurnal**

Asmara G. 2002, “Eksistensi Komnas HAM Ditinjau Dari Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Hukum*. Vol. VII No.4

Barhamudin A. B, 2021, “Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 21 No. 3

Dwiyanti I. A. 2021. “Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).” *Jurnal Hukum*. Vol. 3 No. 2

Fifi Qurania, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Massa Aksi Sebagai Korban Tindakan Represif Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian.” *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1

Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti, 2021, “Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan

UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).” *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2

Lady Mutiara Apicha, 2021, “Kedudukan Komisi Nasional HAM Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan.” *Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol. 1, No. 1

Marzuki, S. 2010, “Politik Hukum HAM di Indonesia Pada Era Reformasi (Studi Tentang Pelanggaran HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran Pelanggaran HAM Masa Lalu)”. Disertasi pada Program Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Olivia Adelwais Mandang, 2023, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Demontran Bersifat Anarkis.” *Jurnal Ilmu Hukum*.

Puspitasari, 2002, “Komnas HAM Indonesia Kedudukan Dan Perannya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum*. Vol. 9 No.21

Rommy Patra, 2012, “Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *MMH*, Vol. 41 No.2,

S. L. A, 2017, “Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 2 No.1

Suhardin, 2021, “Eksistensi Komnas HAM Indonesia Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Upaya Mencari Keadilan dengan Pelanggaran HAM.” *Dinamika*. Vol. 27 No.1

Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni, Iswandi, 2024, “Peran Komnas HAM Dalam Mengawasi Dan Memastikan HAM Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993”, Vol. 4 No. 2.

#### **D. Website**

Anugrah Dwian Andari: *Pengertian Demonstrasi, Aturan, dan Contohnya*. (2024, Agustus 16). Artikel UMSU.ac.id.

<https://www.tempo.co/politik/kronologi-aksi-unjuk-rasa-warga-air-bangis-di-kantor-gubernur-sumbar-demo-ditangkap-dipulangkan-157623/>  
diakses pada tanggal 9 Desember 2024, Pukul 03.01 WIB.

Issha Haruma, Nibras Nada Nailufar: *Pengertian Demonstrasi, Aturan, dan Contohnya*. (2022, April 22). Berita Kompas.com.

Salma, *Penelitian Empiris*. (2023, April 4). Artikel deepublish.com.